



Ziarah Makam Ong Tien: Reproduksi Identitas Kultural Tionghoa Cirebon Pasca Orde Baru

Wildan Ibnu Walid

Universitas Indonesia

Correspondence: E-mail: wildanibnuwalid@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan reproduksi identitas kultural Tionghoa Cirebon yang dipresentasikan melalui praktik ziarah makam Ong Tien. Kebaruan dari penelitian ini terletak bagaimana elemen simbolik beroperasi untuk melegitimasi posisi identitas kultural pasca Orde Baru. Studi ini menggunakan perspektif cultural studies analisis Stuart Hall. Peneliti mengumpulkan informasi mendalam dari para informan yang terlibat langsung dengan konteks masalah penelitian. Selama kurun waktu lebih dari lima puluh tahun kebijakan khusus bagi warga keturunan Tionghoa di era Soeharto. Identitas kultural etnis Tionghoa mengalami pergeseran identitas budaya etnis Tionghoa Cirebon. Pasca Soeharto lengser, etnis Tionghoa Cirebon berupaya mereproduksi ketionghoannya dengan cara menghadirkan kembali simbol Ong Tien sebagai identitas kultural yang menyatu dengan tradisi lokal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa simbol Ong Tien direproduksi untuk melawan diskriminasi etnis pasca Orde Baru. Dengan kata lain, simbol Ong Tien pun menjadi jembatan untuk mengatur ulang relasi etnis Tionghoa Cirebon dengan penduduk lokal.

ARTIKEL INFO

Keywords:

Reproduksi, identitas Kultural, simbol Ong Tien.

1. PENDAHULUAN

Setelah Orde Baru berakhir, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keppres No. 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Inpres No.14 Tahun 1967. Kebijakan itu menjadi harapan baru bagi warga etnis Tionghoa di Indonesia untuk untuk mengekspresikan kembali identitas kebudayaan moyang mereka. Kendati Keppres tersebut menghilangkan istilah pribumi dan non-pribumi, namun dalam perjalanannya penerimaan warga lokal terhadap etnis Tionghoa tidak mudah langsung diterima. Stereotip “li-yan” yang melekat terhadap etnis Tionghoa di Indonesia belum memudar (Sopiah, 2017).

Aimee Dawis ((Dawis, 2013) menjelaskan, keadaan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi pada awal era Orde Baru membuat etnis Tionghoa di Indonesia mengalami keguncangan identitas kultural. Sementara bagi *peranakan* Tionghoa yang lahir sesudah 1966 mengalami krisis identitas sebagai akibat dari kebijakan asimilasi yang dipaksakan pemerintahan saat itu. Di kalangan warga Tionghoa, pemberlakuan Instruksi Presiden (Inpres) No.14 Tahun 1967 Tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina selama tiga dasawarsa yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto merupakan pengalaman yang tragis.

Dampak dari kebijakan itu membuat identitas mereka terasingkan dalam konteks kebudayaan, akibat kebijakan pembatasan ekspresi kultural dan stigma negatif kepercayaan dan keagamaan Cina di Indonesia (Suryadinata, 1987; Tan, 2008). Gilroy (dalam Dworkin, 2009) berpendapat bahwa pengalaman tentang invasi, perang, kontaminasi, hilangnya identitas telah menghasilkan pengalaman suasana hati yang cemas “melankolik” merupakan bagian dari infrastruktur budaya tempat itu.

Kondisi ini membenarkan konsep Stuart Hall (1990) dimana identitas kultural mencerminkan pengalaman sejarah dan budaya

yang sama di antara sekelompok orang. Dengan latar belakang tersebut juga subkultur etnis Tionghoa membedakan identitas budayanya dengansubkultur etnik Tionghoa lainnya. Konsep ini sejalan dengan konsep Hebdige (1999) bahwa setiap masyarakat maupun kelompok selalu berusaha agar mempunyai perbedaan dan ciri khasnya dapat terlihat oleh yang lainnya. Ciri khas yang mewakili kelompok tertentu agar terlihat berbeda dengan kebudayaan utama disebut dengan subkultur (*subculture*).

Pada Maret 2018, warga keturunan etnis Tionghoa di Cirebon pertama kali melakukan secara teroganisir prosesi ziarah ke makam salah satu istri dari Sunan Gunung Jati, Putri Tan Ong Tien Nio yang berlokasi di kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati, di Desa Astana, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon. Kedatangan rombongan peziarah dari berbagai latar belakang —usia, gender, dan agama—bersama-sama memanjatkan doa di hadapan areal makam Ong Tien yang merupakan salah satu istri dari Sunan Gunung Jati.

Ritual ziarah ke makam Ong Tien atau *ngunjung* Makam Ong Tien itu digagas oleh para tokoh peranakan Tionghoa Cirebon sebagai ekspresi kerinduan terhadap tokoh leluhur mereka. Sebab, selama periode pemerintahan Soeharto berkuasa, masyarakat peranakan Tionghoa di Indonesia mengalami pembatasan aktivitas kultural. Kebijakan pembatasan kultural ketionghoan itu diatur secara jelas melalui Instruksi Presiden No.14 tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.

Dalam kebijakan itu tertulis bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia dianggap memiliki ikatan negeri leluhur yang berpusat di Cina. Sehingga, pemerintahan Orde Baru menganggap adat istiadat, tata cara peribadatan, hingga aktivitas yang berbau identitas ketionghoan akan

memunculkan masalah terhadap keberlangsungan proses asimilasi. Sehingga perlu diatur kegiatannya dengan proporsi yang wajar. Pembatasan aktivitas kultural tersebut berdampak langsung bagi etnis Tionghoa di Indonesia, tak terkecuali di Cirebon.

Akibat adanya tekanan kebijakan Orde Baru terkait larangan menggelar aktivitas adat istiadat Tionghoa secara mencolok, warga peranakan Tionghoa Cirebon mulai mengurangi kegiatan ziarah ke makam Ong Tien. Kendati demikian, tidak dipungkiri secara individu warga Tionghoa Cirebon masih berziarah ke Makam Ong Tien. Dengan kata lain, selama Orde Baru berkuasa warga peranakan Tionghoa di Cirebon tidak mengunjungi makam Ong Tien secara berduyun-duyun. Hal itu dilakukan untuk menghindari tekanan dari aparat pemerintah.

Sebelum era Soeharto, motivasi para peziarah (baik warga lokal maupun etnis Tionghoa) mengunjungi makam leluhur di Kompleks Pemakaman Sunan Gunungjati lebih banyak bertujuan mengharapkan keberkahan dan pertolongan di akhirat (kehidupan setelah mati). Selain itu, motivasi ziarah juga bertujuan agar orang yang hidup mengingatkan dirinya akan datangnya kematian, (Ali Muhamud, 2007). Meskipun praktik ziarah ke Makam Ong Tien sudah lama dilakukan oleh etnis Tionghoa Cirebon, terjadi pergeseran motivasi ziarah dan pemaknaan terhadap simbol Ong Tien. Hal itu didasari pemberlakuan kebijakan pembatasan adat istiadat di era Soeharto berdampak pada aktivitas tradisi bagi warga etnis Tionghoa Cirebon.

Motivasi dan makna simbolik di balik praktik ziarah makam Ong Tien dalam konteks pasca Orde Baru perlu ditinjau ulang. Dengan kata lain, perubahan makna atas praktik ziarah ke makam Ong Tien pasca pemerintahan Soeharto ini menjadi babak baru etnis

Tionghoa Cirebon mereproduksi identitas kultural mereka.

Bagi masyarakat etnis Tionghoa di Cirebon, simbol Ong Tien tidak hanya sekedar dimaknai sebagai tokoh berpengaruh yang merepresentasikan keberadaan mereka di Cirebon selama berabad-abad. Lebih dari itu, Ong Tien dianggap sebagai simbol yang diimajinasikan dapat menjadi perekat relasi identitas etnis Tionghoa Cirebon dengan penduduk lokal. Temuan awal mengenai perubahan makna simbolik Ong Tien ini dijelaskan oleh penggagas *event* ziarah Makam Ong Tien, Permadi Budi Atma yang mengatakan bahwa praktik ziarah tersebut bertujuan mengingat kembali sosok Ong Tien bagi warga keturunan Tionghoa di Cirebon. Simbol Ong Tien diharapkan menjadi perekat relasi antara etnis Tionghoa dengan penduduk lokal.

Kasus di atas memberikan gambaran awal mengenai etnis Tionghoa Cirebon yang berupaya melakukan pembaruan identitas subkultur untuk menegosiasikan penerimaan mereka terhadap warga lokal. Simbol Ong Tien sebagai media yang memiliki ikatan sosio-kultural Tiongkok dan Caruban (Cirebon). Identitas arus utama ke-Cina-an itu menjadi jalan untuk memotret dan menjelaskan pembaruan identitas etnis Tionghoa Cirebon yang dikontekstualisasikan dalam fenomena ziarah ke Makam Ong Tien.

Darma bakti kepada leluhur, kekerabatan, dan memegang teguh nilai-nilai akar tradisi merupakan karakter tak terpisahkan dalam peradaban masyarakat Cina (P. S. Sangren, 2017). Salah satunya adalah ziarah. Ziarah (*jinxing*) merupakan topik penting dalam studi Cina untuk menyelami lebih dalam makna kulturalnya (Hoon, 2006; P. Sangren, 1987). Mengutip James Watson (dalam Huang, 2009) untuk menjelaskan karakter ke-Cina-an dapat dilihat melalui bagaimana mereka memahami, dan menerima pandangan, serta adat atau cara untuk

melakukan ritual yang terkait dengan siklus hidup, seperti ritual pernikahan dan pemakaman. Dengan mengikuti rutinitas ritual yang diterima, warga negara biasa berpartisipasi dalam proses penyatuan budaya.

Sangren (2017) mengatakan, etnis Cina memiliki keunggulan dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan simbol. Simbol dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dengan menggunakan atribut pribumi (Cirebon). Dalam hal ini masyarakat pribumi yang mayoritas beragama Islam tradisi kental dengan aktivitas menziarahi makam leluhur, mendukung pertemuan kultural dengan etnis Tionghoa Cirebon yang masih kental dengan *pialial piety* (kedarmabaktian kepada leluhur). Melalui konsep reproduksi, identitas tidak dipahami sebagai sesuatu yang tetap, statis, dan tak bisa berubah (*fixed*), melainkan sebagai proses *becoming*, terus berlangsung, berkelindan, dan bekerja dalam konteks. Maka itu, interaksi jelas memainkan peran penting pada saat terjadinya proses reproduksi identitas (Hadi, 2014).

Pesan-pesan yang dikomunikasikan dalam aktivitas ziarah ke makam Ong Tien Nio berupaya untuk mereproduksi elemen identitas mereka yang menyangkut banyak aspek mulai dari nilai maupun tindakan mereka. Dengan mengatur ulang relasi mereka, seperti dengan cara mencari ikatan simbolis kultural, menarasikan kembali sejarah pertalian Cirebon-Tiongkok, memperingati kegiatan mengenang kematian leluhur, merayakan hari keagamaan bersama dan kegiatan seremonial lain melibatkan masyarakat lokal.

Ditarik dari genealogi sejarah, ikatan pertalian antara etnis Tionghoa dengan Cirebon sebenarnya sudah sangat lama. Bahkan, kedatangannya ke Jawa diantar oleh sekitar 400 pasukan perngiring Kekaisaran Cina. Di dalam naskah *Purwaka Caruban Nagari* tercatat, separuh dari pasukan pengiring Putri

Ong Tien memeluk agama Islam tanpa paksaan. Catatan tersebut menyiratkan bahwa proses interaksi budaya etnis Tionghoa di Cirebon sudah lama terjadi. Dari sejarah hubungan yang dibangun antara etnis Tiongkok dengan masyarakat lokal di Tanah Caruban menandakan bahwa Peradaban Cirebon –atau lebih luas dalam konteks kebangsaan— tidak lepas dari sumbangsih keberadaan etnis Tionghoa (Naskah Purwaka Caruban Nagari).¹

Denys Lombard (2008; lihat juga Kusumadewi, 2010) membenarkan, masyarakat Indonesia merupakan sebuah kubangan multikultural. Menurutnya Pulau Jawa adalah pulau penting di Nusantara, karena menjadi tempat “berlabuh” semua peradaban dari berbagai dunia dan tempat yang paling mendukung terjadinya persilangan budaya. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia adalah laboratorium raksasa persilangan budaya yang sudah terbiasa hidup dalam perbedaan dan dinamika persoalannya, serta mendukung terjadinya produksi dan reproduksi budaya. Hal itu menandakan bahwa sejak lahir dan selama hidupnya, masyarakat Indonesia hidup bersama keragaman; mulai dari ras, etnis, sub-etnis, bahasa dan bahkan sistem kepercayaan.

Fenomena etnis Tionghoa Cirebon berziarah ke Makam Ong Tien, tidak lain sebagai upaya mereka untuk melawan narasi stereotip yang melekat oleh penduduk lokal. Menurut Stuart Hall (dalam Sparks, 2006) kekuatan konsepsi perlawanan yang dikembangkan oleh aliran *Centre for Contemporary Cultural Studies* (CCCS) diinterpretasikan sebagai suatu yang relasional dan bukan suatu tindakan yang tetap (*fixed*). Dengan kata lain, perlawanan etnis Tionghoa Cirebon terhadap stereotip tidak dipahami sebagai suatu yang tunggal, melainkan perlawanan yang dipahami sebagai sesuatu yang terbentuk oleh

¹ Catatan Naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari* (sudah dalam bentuk terjemah) ini didapat dari arsip

Kesultanan Keraton Kanoman Cirebon yang ditulis oleh Pangeran Arya Caron pada tahun 1720.

berbagai repertoar yang maknanya bersifat khas dalam waktu, tempat dan hubungan sosial tertentu. Dalam konteks ini, peneliti berupaya menggali lebih dalam apa yang sebenarnya melatarbelakangi mereka sehingga harus menghadirkan simbol Ong Tien untuk mereproduksi kultural mereka.

2. STUDI LITERATUR

Upaya negosiasi untuk mereproduksi identitas kultural dilakukan etnis Tionghoa di berbagai daerah. Dari tinjauan berbagai literatur, kelompok etnis Tionghoa di Indonesia bukanlah suatu kelompok yang tunggal/homogen. Etnis Cina begitu beragam hampir seperti suku yang ada di negara kepulauan Indonesia, (Alkadrie et al., 2017). Symphony Alkeba (2017) dalam studinya mengatakan, identitas Tionghoa saat ini, bukan lagi mengenai budaya Tionghoa yang terkoneksi dengan budaya asal mereka dari Cina Daratan. Identitas kultural etnis Tionghoa yang tersebar di negara-negara Asia Tenggara cenderung lebih mudah beradaptasi dalam bahasa, budaya lokal, agama dan adat istiadat dimana mereka tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama.

Alkeba mengutip analisis Gungwu yang menjelaskan identitas ketionghoan saling tumpang tindih, menyilang, selalu tidak bisa dilepaskan dari pencampuran identitas, dan berubah dari waktu ke waktu. Hal tersebut menyebabkan pula adanya perbedaan identitas dan artikulasi identitas antara generasi tua dan generasi muda etnik Tionghoa saat ini. Keberagaman latar belakang budaya, sejarah, bahasa, dan geografi membentuk subkultur etnik Tionghoa di Indonesia. Keberagaman ini juga yang menjadi faktor yang mendorong identitas kultural orang Tionghoa di Indonesia memiliki corak yang berbebeda.

Kasus di beberapa negara, warga keturunan Cina melakukan pembaruan dari kebudayaan arus utama sebagai imbas dari kebijakan politik. Seperti etnis keturunan Cina

di Desa Banmai wilayah utara Thailand. Orang Tionghoa keturunan Yunnan di sana berusaha memperbaiki cita-cita budaya tradisional mereka yang bermukim di hutan belantara Thailand utara. Dalam konteks ini, mereka melibatkan simbol *Chineseness* dalam ritual populer yang berfungsi sebagai modal simbolis, agar penduduk Banmai dapat menerima keberadaan mereka di dalam masyarakat Thailand (Huang, 2009). Dalam jurnalnya yang berjudul *Religion as a means of cultural reproduction: popular rituals in a Yunnan Chinese village in northern Thailand*, Huang menjelaskan bahwa Desa Banmai didiami oleh beragam etnis: Etnis Cina Yunnan, Burma, Cina Thai, etnis Thailand, dan etnis pegunungan lainnya. Keturunan Cina Yunnan di Desa Banmai menganggap diri mereka sebagai pembawa budaya asli Tiongkok. Keyakinan ini menjadi dasar etnis lain di Banmai membangun stereotip “komunis” kepada mereka. Mengingat sejarah komunisme di Cina berkembang pesat di wilayah Yunnan. Pengintegrasian warga Cina Yunnan dengan etnis lain di Banmai dinegosiasikan melalui pendekatan kultural dengan jalan partisipasi mereka ke dalam praktik ritual populer. Penduduk desa menyatakan komitmen mereka terhadap moral utama dan nilai-nilai ortodoksi Konfusianisme ketika mereka memahaminya.

Ritual populer yang diciptakan kelompok berbagai etnis itu penting dijadikan jembatan penghubung antar relasi etnis di Banmai, karena mereka sering memfasilitasi pertemuan, baik formal maupun individu. Melalui ritual populer itu penduduk desa secara resmi menyatakan kesetiaan mereka pada budaya Cina. Dalam pengertian ini, ritual populer yang mereka ciptakan berfungsi sebagai sarana dan tujuan dalam proses reproduksi identitas kultural. Pengakuan hak warga negara kepada warga Cina Yunnan di Thailand diberikan hak hukum penuh. Akan tetapi, hal itu juga menciptakan kesan bahwa

warisan budaya “otentik” yang dibayangkan etnis Cina Yunnan mungkin akan hilang.

Beberapa kasus serupa juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Seperti di Lasem, Jawa Tengah dimana relasi sosial antara warga keturunan Tionghoa setempat dengan warga lokal Jawa dan santri membentuk sebuah model harmoni sebagai buah hasil reproduksi budaya yang menegosiasikan kepentingan. Negosiasi ini dicapai dengan jalur komunikasi yang dibangun bersama yang bertujuan menjaga perdamaian dan membendung kekerasan yang disebabkan pengaruh politik nasional maupun lokal, khususnya pada era Orde Baru. Komunikasi antar elit di Lasem untuk menjaga perdamaian dituangkan dalam deklarasi bernama “Lasem milik Bersama” pada tahun 1998, (Aziz, 2013).

Reproduksi budaya melalui tradisi lokal pun terjadi di Kabupaten Bagansiapiapi Provinsi Riau. Upaya negosiasi kultural warga lokal dengan warga keturunan etnis Tionghoa dibentuk melalui tradisi Go Cap Lak atau tradisi bakar tongkang. Tradisi yang sudah lama ada dan merupakan satu-satunya yang ada di Kabupaten Bagansiapiapi. Upacara Bakar Tongkang adalah simbol ritual sebagai wujud kekayaan budaya yang terbentuk akibat keinginan pendatang asal Tiongkok yang bertahan hidup di tempat asing. Bagansiapiapi sendiri merupakan daerah pesisir yang pernah berjaya karena dikenal sebagai kota nelayan ikan terbesar kedua di dunia. Sejarah masyarakat etnis Tionghoa di sana punya peran besar dalam meningkatkan industri perikanan.

Kendati demikian, kemasyhuran Bagansiapiapi sebagai industri penghasil ikan terbesar pernah meredup. Akan tetapi, redupnya industri ikan tersebut tak memupus harapan warga setempat dengan warga keturunan Tionghoa. Dalam perkembangannya, tradisi tersebut bukan saja menjadi simbol penopang perekonomian warga

Kabupaten Bagansiapiapi, melainkan juga menjadi identitas baru keragaman budaya dari reproduksi budaya melalui negosiasi kultural antar warga etnis Tionghoa dengan warga lokal. Khususnya menjadi identitas baru yang menjembatani warga lokal dan keturunan etnis Tionghoa (Isnaini, 2012)

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan studi kasus. (Basuki, 2006) menjelaskan, bahwa studi kasus merupakan bentuk penelitian ini memiliki kekhususan atas fenomena tertentu. Dengan begitu, peneliti akan menjelaskan persoalan khas pada kasus praktik ziarah makam Ong Tien yang dilakukan etnis Tionghoa di Cirebon untuk menjelaskan reproduksi identitas mereka secara mendalam. Studi kasus memiliki unsur intrinsik artinya berfokus pada studi kasus yang memiliki sisi keunikan dan menarik untuk diteliti lebih dalam (Creswell et al., 2007). Metode ini sesuai dengan studi penelitian tentang bagaimana upaya reproduksi identitas kultural etnis Tionghoa Cirebon dieksplorasi dari sudut ritual ziarah ke makam Ong Tien pasca Orde Baru.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kesadaran Kolektif Memori Diskriminasi Orde Baru

Kesadaran kolektif atas memori diskriminasi di era pemerintahan Soeharto mendorong warga keturunan etnis Tionghoa Cirebon mendorong melakukan reproduksi identitas kultural (Ritzer & Goodman, 2008). Upaya tersebut dilakukan dengan menarasikan kembali sejarah keberadaan Tionghoa di Cirebon. Cara itu dipandang efektif untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat terutama peranakan Tionghoa Cirebon bahwa keberadaan mereka sudah ada sebelum Cirebon berdiri, atau bahkan turut berperan dalam membangun Cirebon. Kondisi ini mendukung analisis Durkheimian bahwa kesadaran kolektif membangun social order

dan menjaga kesatuan dalam komunitas masyarakat tertentu (Hakim, 2020).

Salah satu aktor dibalik event ziarah makam Ong Tien, IYG menuturkan pengalaman diskriminasi dengan ragam bentuknya di masa Orde Baru. Bentuk diskriminasi yang paling terasa yaitu pelarangan aktivitas menyelenggarakan tradisi ketionghoan dan tuduhan terlibat gerakan komunisme 30 September. Warga peranakan Tionghoa tidak diizinkan menggunakan nama toko dengan nama Cina, apalagi menggunakan huruf mandarin. Kondisi itu diperparah dengan penjarahan buku-buku dan dokumen yang dianggap berkaitan dengan (ke)Cina(an). Selain tuduhan terlibat komunisme, bentuk diskriminasi juga terjadi stereotipe negatif yang dibangun pemerintah dan masyarakat. Kesadaran atas perasaan bersama di antara komunitas Tionghoa Cirebon mendorong terjadinya perubahan identitas etnis. Memori diskriminasi Orde Baru menciptakan ikatan kolektif atas kesadaran adanya resistensi kekuasaan yang di alami antara kelompok etnis, (Sarup, 1997).

Insiden anti-Cina di era Orde Baru terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kendati tidak secara serentak, kebijakan rezim terhadap etnis Tionghoa dilakukan secara sistematis melalui kebijakan negara. Pemerintah Orde baru menerbitkan Instruksi Presiden No. 14/1967 mengenai pelarangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Pemerintah menilai bahwa adanya keterlibatan keturunan dalam peristiwa September 1965 merupakan hasil dari tidak meleburnya warga Cina dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, aturan tersebut diberlakukan dengan tujuan terciptanya asimilasi di antara pribumi dengan keturunan Tionghoa (Suharto, 2019).

Pemerintah mengambil langkah meluncurkan program asimilasi dengan sangat gencar untuk mengatasi 'masalah' Cina. Ke-

bijakan asimilasi yang dipaksakan oleh kebijakan tersebut memunculkan persoalan baru atas rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi sebelum-sebelumnya. Kebijakan Inpres No. 14/1967 tersebut secara langsung melarang etnis Tionghoa mengekspresikan adat istiadat leluhur dari Tiongkok. (Darini, 2011; Mustajab, 2017; Rahardjo, 2005). Adanya resistensi budaya melalui elemen kekuasaan tersebut berpeluang menjadi jalan menuju proses pembentukan identitas kolektif Jenkins (1994).

Pelarangan menggelar perayaan adat istiadat tradisional ketionghoan yang berlangsung selama 30 tahun lebih masa pemerintahan Soeharto tersebut merugikan identitas kultural etnis Tionghoa. Informan SP menegaskan bahwa akibat aktivitas kultural Tionghoa dibatasi dan tidak bisa disemarakkan di muka umum berdampak pada ikatan kultural di antara komunitas Tionghoa. Nilai kekerabatan leluhur yang sudah diwariskan secara turun temurun perlahan mulai terkikis karena masyarakat Tionghoa tidak bisa menjalankan adat istiadat secara semarak. Kebijakan tersebut berdampak pada masalah identitas kultural etnis Tionghoa. Terutama, kegucangan identitas karena tidak memahami karakter ketionghoan. Generasi setelahnya tidak pernah terlibat secara langsung dalam perayaan maupun praktik tradisi Tionghoa.

Tidak adanya ruang untuk menunjukkan identitas sebagai Tionghoa di muka umum membuat solidaritas dan kedarmabaktian di kalangan Tionghoa semakin memudar. Pada konteks ini, identitas kultural Tionghoa dirugikan oleh kebijakan Orde Baru yang melarang mereka mengekspresikan kebudayaan yang berasal dari Tiongkok. Disamping itu, hubungan antar etnis lain di Cirebon semakin lebar. Hal itu disebabkan karena pemerintah Orde Baru membangun stereotip bahwa etnis Tionghoa berafiliasi dengan Tiongkok yang pada saat itu berhaluan komunis (Yudha, 2020). Sehingga

keturunan Tionghoa di Cirebon dijauhi oleh masyarakat setempat karena dipandang terikat dengan PKI yang pada saat itu merupakan organisasi terlarang dan tidak beragama/bertuhan.

Kesadaran perasaan bersama antar individu di dalam komunitas etnis Tionghoa atas diskriminasi pemerintahan Orde Baru tersebut memunculkan identitas kolektif sebagai perangsang partisipasi kelompok melakukan perubahan identitas. Identitas kolektif dipengaruhi oleh pengalaman dan solidaritas anggota kelompok yang dapat diidentifikasi dan diekspresikan melalui simbol, bahasa, pakaian atau atribut, ritual, kepercayaan, dan lain sebagainya (Van Stekelenburg & Klandermans, 2013).

4.2. Titik Temu Tradisi Ziarah: Ruang Sosial Reproduksi Identitas

Tradisi ngunjung makam atau ziarah kepada makam sesepuh yang dikeramatkan sudah ada sejak sebelum Kesultanan Cirebon berdiri, lebih tepatnya ketika Cirebon masih dikuasai oleh Kerajaan Galuh bercorak Hindu-Budha. Bahkan ritual itu terus dilestarikan ketika masa kesultanan Cirebon yang bercorak Islam berkuasa. Seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut dimanifestasikan melalui ritual Grebeg Syawal. Grebeg Syawal merupakan salah satu tradisi yang hingga kini masih dilakukan oleh Kesultanan Keraton Kasepuhan dan Kanoman. Tradisi itu dilaksanakan pada setiap tanggal 8 Syawal kalender Islam di kompleks pemakaman Astana Gunung Sembung Kecamatan Gunungjati Cirebon. Makna dari tradisi ini adalah sebagai wujud penghormatan kepada leluhur yang sudah mendahului, khususnya kepada tokoh-tokoh berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Cirebon.

Adanya kesamaan dengan tradisi ziarah antara etnis Tionghoa dengan tradisi lokal yang sudah lama ada tersebut, dimanfaatkan untuk menyatukan praktik ziarah bersama

tanpa mengubah adat istiadat masing-masing tradisi. Ziarah bersama antara etnis lokal dengan warga keturunan Tionghoa berhasil menemukan momentumnya pada acara ngunjung makam Puti Ong Tien. Ritual ziarah Ong Tien etnis tersebut melibatkan elemen masyarakat Cirebon, yang bertujuan mencari titik temu persamaan antara kedua tradisi. Pada masyarakat Cirebon mengenal dengan ritual ziarah Grebeg Syawal atau ngunjung. Grebeg Syawal merupakan tradisi turun menurun masyarakat mengunjungi makam sesepuh atau pendahulu mereka yang dirayakan pada bulan Syawal kalender Islam. Masyarakat berduyun-duyun yang dipimpin oleh sultan dari keraton Kasepuhan dan Kanoman dan pini sepuh untuk menggelar acara doa bersama di kompleks Makam Sunan Gunung Jati (wawancara RSH, 12 September 2020).

Makam Ong Tien bersanding dengan makam Sunan Gunung Jati terletak di puncak bukit Gunung Sembung, Desa Astana, Kabupaten Cirebon. Agar bisa menjumpai pusara makam, terlebih dulu harus menaiki puluhan anak tangga dan melewati sembilan pintu. Di setiap jalan menuju setiap pintu juga terpajang guci dan ornamen piring yang menempel pada dinding bangunan kompleks makam. Benda-benda tersebut didatangkan langsung dari Tiongkok sebagai hadiah atas pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyi Ong Tien.

Pusara Ong Tien sendiri berada di Dalem Pura di pintu kesembilan bernama Lawang Teratai. Tidak sembarang orang boleh sampai ke pintu kesembilan (Pintu Teratai). Selain juru kunci, hanya abdi dalem keraton dan keturunannya yang bisa mendapat akses ke ruang utama. Kendati demikian, pengunjung masih bisa mendapat restu atau surat izin tertulis atau rekomendasi dari keraton (Kanoman dan Kasepuhan) jika ingin berziarah atau berdoa langsung di hadapan Makam Ong Tien. Aturan tersebut oleh

kuncen (pengerus) kompleks pemakaman dan sudah berlangsung secara turun menurun.

Rombongan peziarah hanya diperkenankan berdoa di serambi utama menghadap Pintu Pasujudan. Di sebelah barat serambi utama dibatasi dengan Pintu Mergu. Pintu Mergu merupakan gerbang menuju kompleks pemakaman warga etnis Tionghoa. Sehingga peziarah warga keturunan Tionghoa bisa melakukan ritual di dalam kompleks tersebut. Di kompleks tersebut terdapat pula Hiolo besar terbuat dari logam kuningan. Hiolo merupakan tempat penyimpanan dupa yang dibakar ketika warga etnis Tionghoa beragama Konghucu berdoa.

Kesamaan adanya ritual menziarahi makam leluhur tersebut dimanfaatkan bagi etnis Tionghoa Cirebon untuk menggelar tradisi secara bersama-sama. Pada hakikatnya, menurut etnis Tionghoa, ritual ziarah makam leluhur memiliki esensi makna yang serupa dengan tradisi Chengbeng. Bagi warga Tionghoa, tradisi Chengbeng digelar di bulan ketiga dalam kalender Kong Zi. Tradisi tersebut juga sebagai manifestasi ungkapan makna rasa syukur kepada pendahulu mereka. Dalam praktiknya, tradisi Chengbeng dan Grebeg Syawal juga terdapat kesamaan ritual, antara lain; membersihkan pusara makam, membawa berbagai makanan untuk dibagikan kepada peziarah, dan menyampaikan doa-doa. Pertemuan tradisi ziarah kubur antara etnis Tionghoa dan etnis lokal (Cirebon) menjadi titik pangkal untuk memulai hubungan yang “dipisahkan” oleh pemerintah Orde Baru. Disamping itu, praktik ziarah bersama ke makam Ong Tien bertujuan untuk menegaskan keberadaan identitas Tionghoa Cirebon yang sudah ada sejak lama.

Dalam pandangan (Jenkins, 1994) pertemuan tradisi ziarah etnis Cirebon dengan etnis Tionghoa menjadi ruang sosial untuk terjadinya proses pembentukan

identitas kolektif. Pertemuan tradisi tersebut dikonstruksikan dengan cara membuat narasi bersama hubungan Cirebon dan Tiongkok. Narasi yang disepakati merupakan hal penting dalam upaya pembentukan identitas kolektif khususnya bagi kelompok yang berada di luar arus budaya utama. Selanjutnya, reproduksi identitas terjadi melalui proses praktik dan negosiasi yang berada pada ruang sosial. Adanya upaya membangun nilai-nilai yang berbeda (baru) dari sebelumnya merupakan bagian dari upaya untuk mereproduksi identitas kolektif.

4.3 Ong Tien: Manifestasi Simbol Kultural

Ziarah kubur merupakan salah satu aktivitas budaya yang melekat di kalangan etnis Tionghoa. Mereka memahami bahwa ziarah merupakan ekspresi darma bakti dan penghormatan terhadap leluhur. Dalam tradisi Tionghoa, ziarah lebih dikenal dengan sebutan Cengbeng. Pemujaan terhadap roh leluhur memiliki peranan penting sebagai upaya membangun ikatan kekerabatan bagi keturunan Cina. Dengan demikian, praktik ziarah makam Ong Tien sebagai pintu masuk untuk merajut kembali ikatan kekerabatan dan semangat mewariskan tradisi adat istiadat komunitas Tionghoa yang sebelumnya mengalami pembatasan kultural atas kebijakan pemerintahan Soeharto. Pemaknaan terhadap simbol Ong Tien ini merupakan titik penjahitan antara dimensi sosial dan psikis yang ditawarkan ke dalam wacana sosial dan menjadi modal sebagai daya tawar di ruang sosial untuk menempatkan posisi identitas (Hall, 1997b).

Di era Orde Baru, semua kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat Cina dilarang tampil di muka umum, karena menganggap ikatan kekerabatan yang kuat peranakan Cina di Indonesia masih terhubung dengan negeri moyang mereka (Republik Rakyat Tiongkok/RRT). Pemerintahan Soeharto menilai hubungan kuat dengan

Cina sebagai sumber masalah munculnya gerakan komunisme di Indonesia, termasuk peristiwa 30 September. Atas dasar itu, pemerintah Orde Baru mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya Instruksi Presiden No. 14/1967 yang secara tegas melarang seluruh adat istiadat Cina diselenggarakan di tempat umum. Termasuk di dalamnya, tradisi mengunjungi ke makam leluhur.

Kebijakan Orde Baru itu merugikan identitas etnis Tionghoa baik secara kultural maupun hak mereka warga negara. Para inisiator acara *ngunjung* makam Ong Tien dan sesepuh etnis Tionghoa di Cirebon (BPA, RSH, IYG dan SP) membenarkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Soeharto tersebut merugikan identitas kultural etnis Tionghoa. Sebab, makna perayaan Cengbeng sendiri adalah mempererat kekerabatan di antara anak keturunan Tiongkok (Jeliana, 2018). Sehingga, kebijakan Orde Baru untuk mengatasi 'masalah' Tionghoa tersebut dianggap sudah membiaskan identitas Tionghoa, karena generasi warga etnis Tionghoa kurang memahami makna asal usul budaya Tionghoa dan kekerabatan di antara mereka mulai terkikis.

Dalam kasus ini dapat dipahami bahwa etnis Tionghoa Cirebon melakukan upaya reproduksi identitas kultural melalui praktik ziarah makam Ong Tien sebagai respons atas kebijakan diskriminasi Orde Baru terhadap etnis Tionghoa. Reproduksi budaya dimaknai sebagai sebuah proses perubahan atau penyesuaian identitas demi keberlangsungan identitas kultural tersebut. Reproduksi identitas budaya dikembangkan dengan tujuan mendapat nilai, simbol serta makna baru (Hall, 1997b). Hall mengatakan, pada proses ini, representasi merupakan hal paling esensial bagaimana makna diproduksi melalui simbol Ong Tien di antara anggota-anggota dari sebuah budaya. Dalam reproduksi budaya melalui bahasa terdapat berbagai makna yang diintegrasikan dalam

kehidupan sehari-hari melalui berbagai cara, termasuk praktik budaya (dalam Ida, 2014).

Upaya menyemarakkan kembali aktivitas ziarah etnis Tionghoa berziarah ke makam leluhur (Ong Tien) yang sempat meredup akibat pemberlakuan kebijakan Inpres No. 14/1967 merupakan reproduksi kultural sebagai proses menuju pemaknaan ulang terhadap identitas ketionghoan. Menurut konsep Stuart Hall (1997) pengalaman sejarah termasuk di dalamnya kesadaran kolektif atas memori diskriminasi Orde Baru mendorong etnis Tionghoa Cirebon menciptakan makna baru identitas ketionghoannya. Praktik ziarah makam Ong Tien bukan lagi dimaknai sebagai aktivitas kultural penghormatan leluhur akan tetapi berkembang sebagai simbol melawan stereotip atau bahkan segala diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Pemaknaan simbolik Ong Tien bukan lagi sebatas merepresentasikan keberadaan etnis Tionghoa Cirebon, melainkan juga sebagai simbol keberagaman dan simbol perlawanan terhadap segala bentuk diskriminasi etnis.

4.4 Ziarah Makam Ong Tien: Strategi dan Medium Reproduksi Identitas

Praktik ziarah makam Ong Tien merupakan medium dan strategi etnis Tionghoa Cirebon mereproduksi identitas kultural. Upaya tersebut dicapai dengan cara merepresentasikan sosok Ong Tien yang memiliki makna ikatan historis antara etnis Tionghoa dengan Cirebon. Sejalan dengan konsep (Harman, 2016) bahwa dimensi budaya tak terlepas dari bagaimana memahami makna dan unsur simbolik yang saling terkait. Dalam konteks ini, Ong Tien beroperasi sebagai simbol ikatan historis yang merepresentasikan makna identitas Tionghoa Cirebon.

Komunitas Tionghoa Cirebon memaknai sosok Ong Tien bukan saja diartikan sebagai tokoh yang turut berjasa dalam membangun Cirebon. Lebih dari itu, tokoh Ong Tien yang merupakan salah satu istri Sunan Gunung Jati

mengandung makna bahwa hubungan Cirebon dan Tiongkok tidak bisa dipisahkan. Sebab, diyakini bahwa orang-orang Tiongkok sudah ada sebelum Kota Cirebon berdiri.

Aktivitas ziarah makam Ong Tien oleh kalangan etnis Tionghoa Cirebon menjadi jembatan etnis Tionghoa Cirebon mereproduksi identitas kultural mereka. Simbol Ong Tien sebagai makna ikatan historis dihadirkan melalui praktik budaya ziarah. Komunitas Tionghoa mendistribusikan narasi tentang keberadaan Ong Tien yang memiliki makna ikatan historis dan makna kultural antara Tiongkok dengan Cirebon. Praktik ziarah tersebut sebagai media untuk memanifestasikan pikiran, ide-ide, dan perasaan komunitas etnis Tionghoa sebagai identitas kultural 'baru' yang lebih adaptif dengan konteks lokal sebagai respons atas pengalaman atau peristiwa yang terjadi (Hall, 1997b).

Di samping itu, praktik ziarah makam Ong Tien pun juga medium untuk meneguhkan kembali identitas etnis Tionghoa kultural mereka atas pelanggaran mengekspresikan adat istiadat Tiongkok yang pernah dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah Orde Baru. Dengan begitu, sebagai upaya antisipatif mereduksi sentimen kepada etnis Tionghoa lebih jauh, komunitas Tionghoa Cirebon menggelar ziarah bersama dengan warga lokal untuk menarasikan kembali sejarah hubungan yang harmonis antara etnis Tionghoa dengan warga Cirebon. Praktik ziarah tersebut menunjukkan bahwa komponen simbol Ong Tien memainkan peran penting dalam makna identitas kultural historis saja, melainkan sebagai simbol keberagaman, sekaligus simbol perlawanan terhadap kebijakan diskriminatif oleh pemerintah Orde Baru (Hall, 1996).

Perubahan nilai praktik ziarah etnis Tionghoa Cirebon tersebut menunjukkan reproduksi budaya terjadi atas pemaknaan yang beragam untuk diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai cara,

termasuk praktik budaya. Makna identitas diekspresikan melalui simbol, serta nilai-nilai yang diciptakan oleh kelompok budaya. Reproduksi budaya selalu terjadi dari dalam dan melibatkan konteks peristiwa yang berbeda, kemudian disirkulasikan melalui proses berbeda pula. Dalam konteks ini, simbol Ong Tien merupakan titik untuk menarasikan dan titik hak pilihan untuk menegosiasikan posisi identitas baru yang ditentukan komunitas Tionghoa Cirebon.

4.5 Motivasi dan Legitimasi dalam Ziarah Makam Ong Tien

Quinn, (2009) memandang bahwa motivasi ziarah banyak aspek, salah satu diantaranya adalah motivasi ikatan sejarah dan politik sebagai faktor determinan dalam praktik ziarah. Dalam kasus ini, sosok Ong Tien dicitrakan sebagai *image* yang memiliki hubungan kuat baik dari aspek historis, kultural dan politik antara Cirebon dan Tiongkok. Hal itu menjadi alasan utama komunitas Tionghoa Cirebon berziarah ke makam Ong Tien. Selain karena motivasi ziarah didasari atas ikatan tradisi zairah (Cengbeng) sebagai ekspresi penghormatan terhadap leluhur, alasan disemarakkan ziarah makam Ong Tien dalam konteks kekinian memuat unsur ekspresi legitimasi identitas keberadaan etnis Tionghoa Cirebon.

Temuan hasil penelitian, praktik ziarah makam Ong Tien menjadi medium mobilisasi untuk membangun kesadaran kolektif atas memori diskriminasi Orde Baru. Terutama bertujuan untuk mengikis pandangan setereotip negatif dan melawan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Ziarah makam Ong Tien bukan hanya dipandang sebagai ziarah kubur secara umum, melainkan terdapat motivasi politik di dalamnya. Motivasi praktik ziarah tersebut diwujudkan dengan melibatkan aparat pemerintah dan warga lokal dari Paguyuban Keratwan Singhapura. Dengan demikian, dari praktik ziarah terse-

but memberikan peluang untuk meraih simpati publik untuk melegitimasi keberadaan identitas Tionghoa di Cirebon (Hall, 1990).

Informan BPA, RSH dan IYG menjelaskan bahwa motivasi ziarah makam Ong Tien bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sejarah Cirebon tidak terlepas dari keragaman etnis. Dipilihnya kompleks pemakaman Astana Sunan Gunung Jati sebagai penyelenggaraan event ngunjung ke makam Ong Tien bukan hanya karena di dalam areal pemakaman terdapat pusara Ong Tien dan Sunan Gunungjati saja. Melainkan karena tempat tersebut memiliki ikatan historis dan ikatan kultural. Simbol Ong Tien merepresentasikan dari kalangan etnis Tionghoa Cirebon. Di samping itu, simbol Ong Tien dapat dimaknai kepada generasi penerus bahwa etnis Tionghoa memiliki ikatan kultural historis dengan Cirebon karena sosok Ong Tien merupakan salah satu istri dari Sunan Gunung Jati.

Gunung Sembung merupakan tempat singgah pertama Laksamana Cheng Ho mendarat di Cirebon saat ekspedisi di tanah Jawa. Di sana juga Cheng Ho turut serta mendirikan mercusuar untuk mengatur lalu lintas perahu di Pelabuhan Muharajati. Atas dasar itu, kompleks pemakaman Astana Gunung Jati juga dipilih karena sebagai 'monumen peringatan keberagaman' karena kompleks tersebut terdapat pusara makam dari berbagai etnis.

Contoh paling sederhana keragaman etnis bisa dipotret dari pusara istri-istri Sunan Gunungjati. Selain Ong Tien, istri-istri lain Sunan Gunungjati juga dimakamkan di Komplek Pemakaman Gunung Sembung Astana. Seperti, istri pertamanya, Nyi Babadan berasal dari asli Desa Babadan Cirebon (etnis Cirebon). Kedua, bernama Nyi Kawunganten berasal dari keturunan Kerajaan Banten (etnis Banten/Betawi). Ketiga, Nyi Pakungwati dari keturunan kerajaan Galuh Pakuan Paja-

jaran (etnis Sunda). Keempat Nyi Rara Sumanding/Nyi Ong Tien Nio dari keturunan Kekaisaran Cina (etnis Tionghoa). Kelima, Nyi Rara Baghdad/Syarifah Mudaim anak keturunan dari keturunan gurunya berasal dari Irak (etnis Persia). Dan keenam, Nyi Mas Tepasari putri kerajaan dari Majapahit/Kesultanan Demak (etnis Jawa).

5. KESIMPULAN

Kebijakan pembatasan kultural etnis Tionghoa yang diatur melalui Instruksi Presiden No.14 tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina membiaskan identitas Tionghoa. Pelarangan menggelar perayaan adat istiadat Tionghoa yang berlangsung selama 30 tahun lebih masa pemerintahan Soeharto merugikan identitas kultural etnis Tionghoa. Tidak adanya ruang untuk mengekspresikan identitas Tionghoa membuat solidaritas dan kedarmabaktian di kalangan warga Tionghoa semakin memudar.

Kesadaran kolektif atas memori diskriminasi kebijakan pemerintah Orde Baru tersebut mendukung proses terjadinya reproduksi identitas kultural etnis Tionghoa Cirebon sebagai upaya legitimasi dan negosiasi posisi identitas Tionghoa Cirebon. Praktik ziarah makam Ong Tien menjadi titik tolak untuk mereproduksi identitas kultural etnis Tionghoa. Melalui praktik budaya tersebut warga etnis Tionghoa menarasikan kembali hubungan historis Cirebon dan Tiongkok yang harmonis.

Pemaknaan ziarah Makam Ong Tien oleh warga etnis Tionghoa Cirebon dalam konteks kekinian mengalami perubahan makna yang lebih luas. Praktik ziarah makam Ong tien tak hanya dimaknai sebatas aktivitas kultural penghormatan leluhur, melainkan pula dimanifestasikan sebagai simbol keberagaman dan perlawanan terhadap segala bentuk diskriminasi etnis.

Sosok Ong Tien yang merupakan salah satu istri dari Sunan Gunung Jati yang merupakan raja pertama Kerajaan Cirebon Dimaknai sebagai simbol kultural dan simbol historis untuk mereduksi sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa. Di samping itu, ziarah ke makam Ong Tien merupakan ekspresi kultural untuk mereduksi sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa yang dikonstruksikan melalui kebijakan pemerintah, khususnya muncul di saat momentum kontestasi politik di Indonesia.

REFERENCES

- Ali Muhamud. (2007). Chinese Muslims in colonial and postcolonial Indonesia. *Islam in Southeast Asia*, 7(2), 1–22. <http://www.hawaii.edu/cseas/pubs/explore/download/v7n2/UHM.Explorations.v7n2.Ali.pdf>
- Alkadrie, J. F., Hanifa, G. F., & Irawan, A. C. (2017). Dinamika Diaspora Subkultur Etnik Cina di Kota Singkawang. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 130. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.4>
- Aziz, M. (2013). Identitas Pemuda Tionghoa Pasca Reformasi: Nasionalisme dalam Transformasi Kepemimpinan pada Organisasi Sosial di Lasem, Jawa Tengah. *Jurnal Studi Pemuda*, 2(2), 117–128.
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Christian, S. A. (2017). Identitas Budaya Orang Tionghoa Indonesia. *Jurnal Cakrawala Mandarin*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.36279/apsmi.v1i1.11>
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264.
- Dawis, A. (2013). *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dworkin, D. (2009). Paul Gilroy And The Cultural Politics Of Decline. *Rethinking History*, 13(4), 521–539. <https://doi.org/10.1080/13642520903293128>
- Hadi, M. Z. (2014). Pemaknaan Khalayak terhadap Penggambaran Orang Jawa Semarang dalam Rubrik Rame Kondhe di Harian Suara Merdeka Summary Skripsi
- Hakim, L. D. R. (2020). Grebeg Sudiro dan Representasi Keberagaman di Sudiroprajan, Kota Surakarta. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(1), 1–11.
- Hall, S. (1990). *Cultural identity and diaspora*. na.
- Hall, S. (1996). Who needs Identity. *Questions of Cultural Identity*, 16(2), 1–17.
- Hall, S. (1997a). Culture and power. *Radical Philosophy*, 86, 24–41.
- Hall, S. (1997b). The work of representation. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, 2, 13–74.
- Harman, S. (2016). Stuart Hall: Re-reading Cultural Identity, Diaspora, and Film. *Howard Journal of Communications*, 27(2), 112–129. <https://doi.org/10.1080/10646175.2016.1148651>
- Hebdige, D. (1999). The function of subculture. *The Cultural Studies Reader*, 2, 441–450.

- Hoon, C.-Y. (2006). Assimilation, Multiculturalism, Hybridity: The Dilemmas of The Ethnic Chinese in Post-Suharto Indonesia 1. *Asian Ethnicity*, 7(2), 149–166. <https://doi.org/10.1080/14631360600734400>
- Huang, S. M. (2009). Religion as a Means of Cultural Reproduction: Popular Rituals in a Yunnan Chinese Village in Northern Thailand. *Asian Ethnicity*, 10(2), 155–176. <https://doi.org/10.1080/14631360902906847>
- Ida, R. (2014). *Metode Penelitian: Studi Media dan Kajian Budaya*. Kencana.
- Isnaini, Z. L. (2012). Go Cap Lak: Ritual Dan Identitas Baru Etnis Tionghoa Di Bagansiapi-Api. *In Media Wisata*, 7(1), 1-9. <http://amptajurnal.ac.id/index.php/MWS/article/view/52/51>
- Jeliana, C. (2018). Perubahan dalam Tradisi Perayaan Cengbeng Padaetnis Tionghoa di Era Modernisasi (Studi pada Etnis Tionghoa di Kabupaten Pringsewu).
- Jenkins, R. (1994). Rethinking Ethnicity: Identity, Categorization and Power. *Ethnic and Racial Studies*, 17(2), 197–223.
- Kusumadewi, L. R. (2010). Kembalinya Subyek: Sosiologi Memaknai Kembali Multikulturalisme. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 15(2), 61–84. <https://doi.org/10.7454/mjs.v15i2.4862>
- Lombard, D. (2008). *Nusa Jawa: Silang Budaya (Jaringan Asia)*. In Le Carrefour Javanais (pp. 1–485).
- Mustajab, A. (2017). Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 5(1).
- Quinn, G. (2009). National Legitimacy through a Regional Prism: Local Pilgrimage and Indonesia's. *The Politics of the Periphery in Indonesia: Social and Geographical Perspectives*, 173.
- Rahardjo, T. (2005). Kebijakan Pemerintah tentang Etnis Cina. *Dialogue JIAKP*, 2(2), 780–802.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2008). *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*. Jakarta: Kencana.
- Sangren, P. (1987). *History and Magical Power in a Chinese Community*. Stanford University Press.
- Sangren, P. S. (2017). *Filial Obsessions*. In *Filial Obsessions*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-50493-3>
- Sopiah, P. S. (2017). Inpres No 14 Tahun 1967 dan Implikasinya terhadap Identitas Muslim Tionghoa Cirebon. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 5(2).
- Sparks, C. (2006). Stuart Hall, cultural studies and marxism. In *Stuart Hall* (pp. 82–113). Routledge.
- Suharto, H. S. (2019). Kebijakan Pemerintah sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama guna Mewujudkan Stabilitas Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Reativ*.
- Suryadinata, L. (1987). Ethnic Chinese in Southeast Asia: problems and prospects. *Journal of International Affairs*, 135–151.
- Tan, M. G. (2008). *Etnis Tionghoa di Indonesia: kumpulan tulisan*. Yayasan Obor Indonesia.

Van Stekelenburg, J., & Klandermans, B. (2013). The social psychology of protest. *Current Sociology*, 61(5–6), 886–905.

Yudha, A. A. N. B. K. (2020). Langkah Cinta Penuh Derita Etnis Tionghoa di Indonesia. *SENADA (Seminar Nasional Desain Dan Arsitektur)*, 3, 47–56.